



Pengaruh Pendidikan dan Upah Minimum Terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh

Meutia Balqis¹, Nurlathifatul Qalbiyah Sinaga², Asnidar³, Nurlaila Hanum⁴,
Puti Andiny⁵, Safuridar⁶

¹⁻⁶ Universitas Samudra, Indonesia

Email : mutiabalqis21@gmail.com¹, nurlatifatulqalbiyahsinaga@gmail.com², asnidar@unsam.ac.id³,
nurlailahanum@unsam.ac.id⁴, putiandiny@unsam.ac.id⁵, safuridar@unsam.ac.id⁶,

Alamat: Jalan Prof Dr. Syarief Thayeb, Meurandeh Tengah, Langsa-Aceh, Indonesia

Korespondensi penulis : mutiabalqis21@gmail.com

Abstract. *This research aims to determine the effect of education and minimum wages on poverty in Aceh province. This research uses secondary data, namely those obtained from the Central Statistics Agency of Aceh Province. The method used in this research is a quantitative method using multiple linear analysis. The research results show that partially the education variable has a negative and significant influence on poverty in Aceh province, while the Minimum Wage variable has a positive and insignificant influence on poverty in Aceh Province. Simultaneously, the variables education and minimum wage together have a significant effect on poverty in Aceh Province.*

Keywords: *Education, Minimum Wage, Poverty.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendidikan dan upah minimum terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif menggunakan analisis linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel pendidikan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di provinsi Aceh, sedangkan variabel Upah Minimum memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh. Secara simultan variabel pendidikan dan upah minimum secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh.

Kata kunci : Pendidikan, Upah Minimum, Kemiskinan.

1. LATAR BELAKANG

Masalah kemiskinan telah menjadi masalah umum di banyak negara, termasuk Indonesia sebagai negara berkembang yang menghadapi persoalan tersebut. Kemiskinan merupakan sebuah kondisi rendahnya tingkat kesejahteraan. Pandangan konvensional mengaitkan antara kesejahteraan dengan kepemilikan barang dimana penduduk miskin didefinisikan sebagai kelompok orang-orang yang tidak memiliki pendapatan atau konsumsi yang tidak mencukupi (Haughton dan Shahidur 2012) dalam (Sirait et al., 2022). Ada beberapa faktor yang mempengaruhi dan berkaitan dengan kemiskinan, seperti tingkat pendapatan, kurangnya pendidikan, masalah kesehatan, sulit mengakses barang dan jasa serta kondisi lingkungan yang tidak mendukung (Sa'diyah 2012).

Kemiskinan adalah permasalahan utama yang terjadi di setiap negara dan daerah termasuk provinsi Aceh. Provinsi Aceh merupakan provinsi dengan persentase jumlah

penduduk miskin tertinggi di Indonesia. Sebesar 15,33 persen pada tahun 2021 dan 14,45 persen pada tahun 2023 (BPS, 2023). Kemiskinan adalah kondisi dimana penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita bulanan dibawah garis kemiskinan atau tidak mampu secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan dan non makanan yang diukur dari sisi pengeluaran (BPS, 2023).

Saat ini Indonesia masih dihadapkan dengan tantangan di bidang kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan ketimpangan sosial. Meskipun terdapat kemajuan besar dalam beberapa dekade terakhir, masih terlihat jelas bahwa banyak masyarakat Indonesia yang menganggur atau setengah menganggur di bawah garis kemiskinan. Tyas (2020) menyatakan bahwa meskipun sumber daya alam melimpah dan populasi tenaga kerja besar, Indonesia masih belum mampu berkembang sesuai dengan laju yang diinginkan. Padahal, melimpahnya tenaga kerja yang tersedia menimbulkan permasalahan baru yaitu pengangguran (Silvia & Wildan, 2024).

Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Sedangkan Provinsi Aceh kaya akan sumber daya alam dan Provinsi Aceh juga menerima anggaran dana otonomi khusus (OTSUS). Penurunan kemiskinan yang bergerak lambat merupakan permasalahan umum di setiap daerah, namun tingkat perlambatannya berbeda. Pemerintah Aceh menargetkan penurunan angka kemiskinan sebesar 14,43 persen. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu keselarasan dalam langkah dan visi misi semua Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) sehingga semua program yang ditargetkan dapat terwujud (Humas Aceh, 2017) dalam (Sirait et al., 2022).

Salah satu faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Provinsi Aceh adalah pendidikan. Wiguna (2013) mengemukakan bahwa pendidikan merupakan pionir dalam pembangunan masa depan. Pendidikan erat kaitannya dengan pembentukan kepribadian, dan pendidikan merupakan salah satu investasi sumber daya manusia untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Orang yang berpendidikan lebih tinggi biasanya memiliki akses yang lebih baik ke pekerjaan bergaji tinggi daripada orang yang berpendidikan rendah (Natasya et al., 2022).

Selanjutnya upah minimum juga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Menaikkan upah minimum sangat penting untuk mengurangi jumlah penduduk miskin. Pemerintah Indonesia harus mengambil tindakan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin, meskipun jumlah penduduk miskin mengalami penurunan setiap tahunnya. Upah minimum adalah salah satu alasan mengapa kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Upah minimum yang lebih tinggi bagi pekerja akan meningkatkan daya beli mereka, yang pada gilirannya akan meningkatkan semangat kerja dan

efisiensi kerja (Amalia et al., 2024). Data perkembangan jumlah penduduk miskin, rata-rata lama sekolah dan upah minimum di Provinsi Aceh tahun 2011-2023 disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1 Data Kemiskinan, Rata-Rata Lama sekolah dan Upah Minimum di Provinsi Aceh Tahun 2011 - 2023.

Tahun	Kemiskinan (%)	Rata-rata Lama Sekolah (%)	Upah Minimum (Rp)
2011	19,48	8,32	1.350.000
2012	19,46	8,36	1.400.000
2013	17,60	8,44	1.550.000
2014	16,98	8,71	1.750.000
2015	17,08	8,77	1.900.000
2016	16,73	8,86	2.118.500
2017	16,89	8,98	2.500.000
2018	15,94	9,09	2.700.000
2019	15,32	9,18	2.916810
2020	14,99	9,33	3.165.031
2021	15,33	9,37	3.165.031
2022	14,64	9,44	3.280.327
2023	14,45	9,55	3.413.666

Sumber: Badan Pusat Statistik (2024).

Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan jumlah dan persentase penduduk miskin Provinsi Aceh tahun 2011-2023 telah menurun, pada tahun 2011, persentase kemiskinan sebesar 19,48 persen, dan pada tahun 2023, persentase kemiskinan turun menjadi 14,45 persen. Meskipun ada fluktuasi di beberapa tahun.

Dari tahun 2011 hingga 2023, pendidikan di Provinsi Aceh terus meningkat. Pada tahun 2011, pendidikan berada di 8,32 tahun, tetapi pada tahun 2023 meningkat menjadi 9,55 tahun. Ini menunjukkan bahwa penduduk Aceh rata-rata mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi setiap tahunnya. Menurut Anderson (2013) dengan pendidikan yang layak, orang miskin lebih mungkin untuk keluar dari status miskin di masa depan (Natasya et al., 2022).

Dari tahun 2011-2023, upah minimum di Provinsi Aceh terus meningkat sebesar 1.350.000 menjadi 3.413.666. Hal ini menunjukkan bahwa langkah yang diambil pemerintah Provinsi Aceh merupakan langkah yang tepat untuk mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan, sehingga berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan di

Provinsi Aceh. Dengan tingkat upah minimum yang meningkat setiap tahunnya, hanya sebagian saja yang dapat memenuhi kebutuhan hidup layak. Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang sulit di atasi. Upaya untuk mengatasi masalah kemiskinan perlu dimulai dari hal mendasar, seperti meningkatkan upah minimum dan memperluas lapangan kerja agar kebutuhan pokok masyarakat tercukupi (BPS,2019).

Berdasarkan data pada tabel 1 menunjukkan presentase kemiskinan mengalami fluktuasi disaat pendidikan dan upah minimum yang terus meningkat, hal ini disebabkan karena adanya covid 19 pada tahun 2019 hingga 2021, yang mengakibatkan banyaknya lapangan usaha mengalami kerugian dan menyebabkan terjadinya pengurangan tenaga kerja.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh Pendidikan dan Upah Minimum terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh tahun 2011-2023 secara parsial dan simultan.

2. KAJIAN TEORITIS

Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah yang ada pada disetiap negara, namun bagi negara berkembang kemiskinan menyebabkan terhambatnya proses pembangunan perekonomian. Kemiskinan merupakan keadaan dimana seseorang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri sesuai dengan taraf hidupnya. Kesulitan, kebutuhan, dan kekurangan merupakan tiga hal yang sering dihubungkan dengan kemiskinan (Romi & Umiyati, 2018). Berbagai upaya kebijakan yang dibuat pemerintah untuk menekan kemiskinan walaupun tetap mendapatkan hasil yang kurang maksimal. Dengan perkembangan industri dan teknologi saat ini tetap saja tidak dapat menuntaskan permasalahan kemiskinan secara mengakar (Siti Hanifah, 2021).

Menurut BPS (2016) kemiskinan adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi, materi dan fisik untuk mencukupi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang di ukur dengan pengeluaran. Kemiskinan bisa dibagi menjadi empat jenis yaitu kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan kultural, dan kemiskinan struktural.

Pendidikan

Pendidikan merupakan kebutuhan paling asasi bagi semua orang karena masyarakat yang berpendidikan setidaknya dapat memiliki kemampuan untuk membebaskan diri dari kemiskinan (Susanto & Pangesti, 2019). Rata-rata lama sekolah (RLS) adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal (tidak termasuk tahun untuk mengulang). Cakupan penduduk yang dihitung

RLS adalah penduduk usia 25 tahun keatas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir (Badan Pusat Statistik, 2023) dalam (Netri et al., 2023).

Pendidikan adalah suatu kegiatan yang saling terkait yang mengandung banyak bagian yang terikat kuat satu sama lain (Sutrisno, 2016). Pendidikan juga memiliki definisi hukum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan: Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang dibutuhkan bagi dirinya, masyarakat, dan bangsa (Natasya et al., 2022).

Upah Minimum

Upah merupakan sumber pemasukan bagi para tenaga kerja sehingga apabila sumber pemasukan turun maka akan berpengaruh pada kesejahteraan tenaga kerja (Siti Hanifah, 2021). Upah merupakan salah satu sumber pendapatan, jika sumber pendapatan berkurang atau tetap sama, maka kesejahteraan juga akan berkurang atau dipertahankan yang tentunya akan berpengaruh pada tingkat kemiskinan (Ningrum, 2017). Menetapkan upah minimum hanya akan mengurangi jumlah pekerja yang sudah bekerja dan meningkatkan pengangguran. Menurut hal ini disebabkan oleh Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan pencari kerja (Borjas, 2013) dalam (Silvia & Wildan, 2024).

Menurut UU No. 13/2003. Upah minimum diarahkan pada pencapaian kebutuhan hidup layak dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Maka dari itu kebijakan upah minimum adalah salah satu strategi pemerintah menanggulangi kemiskinan dengan menghitung kebutuhan dasar seperti: pangan, sandang, dan perumahan, sekaligus sebagai jaring pengaman sosial dengan menghitung kebutuhan pendidikan dasar dan jasa transportasi (Pomarol & Riva, 2014).

Menurut Permen no. 1 Th. 1999 pasal 1 ayat 1, upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Upah minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan usaha atau kerja. Upah ini berlaku bagi mereka yang lajang dan memiliki pengalaman kerja 0-1 tahun, berfungsi sebagai jaring pengaman, ditetapkan melalui Keputusan Gubernur berdasarkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan dan berlaku selama 1 tahun berjalan (Umam, 2018) dalam (Amalia et al., 2024)

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per-01/Men/1999, Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Yang dimaksud dengan tunjangan tetap adalah suatu jumlah ketidakseimbangan yang diterima pekerja secara tetap dan teratur pembayarannya, yang tidak terkait dengan kehadiran ataupun atraksi tertentu. Kebijakan mengenakan upah minimum oleh pemerintah adalah kebijakan yang diterapkan dengan tujuan sebagai jaring pengaman terhadap pekerja atau buruh agar tidak dieksploitasi dalam bekerja dan mendapat upah yang dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum (KHM) (I D. G. M. Radityana et al., 2023).

Hubungan antara Pendidikan dengan Tingkat Kemiskinan

Pendidikan memiliki kontribusi dalam mengentaskan kemiskinan. Sektor pendidikan merupakan investasi jangka panjang dalam mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia agar dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam untuk kemajuan wilayah. Salah satu langkah penting dalam menciptakan sumber daya manusia berkualitas adalah mengurangi jumlah siswa yang putus sekolah, karena putus sekolah dapat menghambat perkembangan siswa dalam mengejar pendidikan mereka (Haughton & Shahidur, 2009).

Hubungan Upah Minimum Dengan Tingkat Kemiskinan

Upah minimum adalah usaha untuk mengangkat derajat penduduk berpendapatan rendah, terutama pekerja miskin. Semakin meningkat tingkat upah minimum akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga kesejahteraan juga meningkat dan sehingga terbebas dari kemiskinan (Okta Ryan et al., 2013)

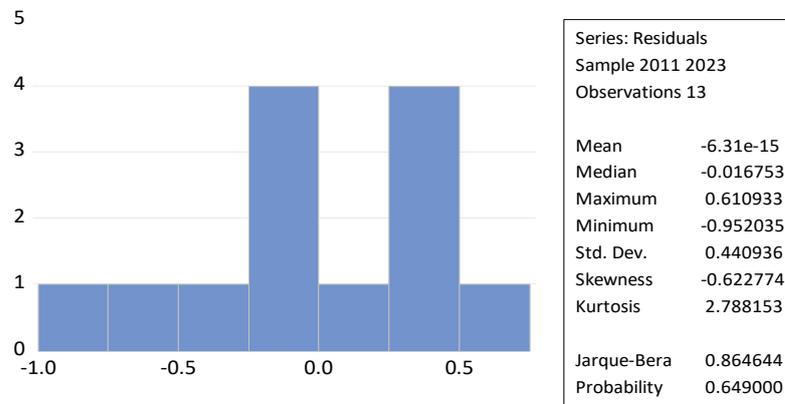
3. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sekunder. Data sekunder berupa data Pendidikan, upah minimum dan kemiskinan di Provinsi Aceh yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik tahun 2011-2023. Teknik analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Untuk mengetahui pengaruh pendidikan (X_1) dan upah minimum (X_2) terhadap kemiskinan (Y) Di Provinsi Aceh. Maka pengolahan data di lakukan dengan analisis regresi linier berganda, data tersebut di olah dengan menggunakan aplikasi *software Eviews*.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas



Gambar 1 Hasil Uji Normalitas

Sumber : estimate Eviews

Berdasarkan gambar 1 diketahui nilai *Probability* sebesar $0,6490 > 0,05$ maka bisa disimpulkan bahwa data berdistribusi secara normal.

b. Uji Heteroskedasitas

Tabel 2 Hasil Uji Heteroskedasitas

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey
Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	4.052235	Prob. F(2,10)	0.0514
Obs*R-squared	5.819453	Prob. Chi-Square(2)	0.0545
Scaled explained SS	3.078719	Prob. Chi-Square(2)	0.2145

Sumber : estimate Eviews

Berdasarkan tabel 2 diketahui nilai *Probability Obs*R-Squared* sebesar $0,0545 > 0,05$ maka bisa disimpulkan bahwa asumsi uji heteroskedasitas sudah terpenuhi atau data tidak terdapat masalah.

c. Uji Autokorelasi

Tabel 3 Hasil Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags

F-statistic	0.941015	Prob. F(2,8)	0.4295
Obs*R-squared	2.475847	Prob. Chi-Square(2)	0.2900

Sumber : estimate Eviews

Berdasarkan tabel 3 diketahui nilai *Probability Obs*R-Squared* sebesar $0,2900 > 0,05$ maka bisa disimpulkan bahwa asumsi uji autokorelasi sudah terpenuhi atau data tidak terdapat masalah.

Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 4 Hasil Output Eviews Regresi Linear Berganda

Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 10/13/24 Time: 22:32
Sample: 2011 2023
Included observations: 13

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	65.87864	18.33159	3.593721	0.0049
X1	-5.813127	2.397221	-2.424944	0.0358
X2	1.120126	1.320278	0.848402	0.4161
R-squared	0.928808	Mean dependent var		16.51769
Adjusted R-squared	0.914569	S.D. dependent var		1.652569
S.E. of regression	0.483021	Akaike info criterion		1.581662
Sum squared resid	2.333096	Schwarz criterion		1.712035
Log likelihood	-7.280805	Hannan-Quinn criter.		1.554865
F-statistic	65.23249	Durbin-Watson stat		1.882595
Prob(F-statistic)	0.000002			

Sumber : estimate Eviews

Berdasarkan tabel 4 dapat dibuat persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 65,87864 - 5,813127 X_1 + 1,120126 X_2$$

Berdasarkan persamaan tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

1. Nilai konstanta adalah sebesar 65,87864 menunjukkan bahwa jika pendidikan dan upah minimum konstan, maka kemiskinan di Provinsi Aceh sebesar 65,87864 persen.
2. Nilai koefisien regresi variabel pendidikan sebesar $-5,813127$, ini menunjukkan bahwa pendidikan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh. Jika pendidikan meningkat sebesar 1 persen maka kemiskinan di Provinsi Aceh menurun sebesar 5,813127 persen, *ceteris paribus*.
3. Nilai koefisien regresi variabel upah minimum sebesar 1,120126, ini menunjukkan bahwa upah minimum berpengaruh positif terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh. Jika upah minimum meningkat maka kemiskinan di Provinsi Aceh meningkat sebesar 1,120126 persen, *ceteris paribus*.

Uji t

Hasil estimasi koefisien variabel pendidikan sebesar $-5,813127$ dan signifikan pada prob. $0,0358 < \alpha = 0,05$. Artinya secara parsial pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh. Jika terjadi peningkatan pendidikan sebesar 1 persen, maka kemiskinan di Provinsi Aceh akan menurun secara signifikan sebesar $5,813127$ persen. Sebaliknya jika terjadi penurunan pendidikan sebesar 1 persen, maka kemiskinan di Provinsi Aceh akan meningkat secara signifikan sebesar $5,813127$ persen dalam satu tahun, *ceteris paribus*.

Hasil estimasi koefisien variabel upah minimum sebesar $1,120126$ dan signifikan pada prob. $0,4161 > \alpha = 0,05$. Artinya secara parsial upah minimum berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh. Jika terjadi peningkatan upah minimum sebesar 1 rupiah, maka kemiskinan di Provinsi Aceh akan meningkat secara tidak signifikan sebesar $1,120126$ persen. Sebaliknya jika terjadi penurunan upah minimum sebesar 1 rupiah, maka kemiskinan di Provinsi Aceh akan menurun secara tidak signifikan sebesar $1,120126$ persen dalam satu tahun, *ceteris paribus*.

Uji F

Hasil uji F dalam penelitian ini diperoleh sebesar $0,000002 < \alpha 0,05$. Maka dapat dinyatakan secara simultan pendidikan dan upah minimum berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Diketahui Nilai *R-Squared* dalam penelitian sebesar $0,928808$ atau $92,88\%$. artinya variabel pendidikan dan upah minimum mempengaruhi kemiskinan Provinsi Aceh sebesar $92,88\%$. Sedangkan sisanya sebesar $7,12\%$ dipengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian ini.

PEMBAHASAN**Pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah Terhadap Kemiskinan**

Berdasarkan tabel 4 hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai koefisien variabel pendidikan sebesar $-5,813127$ dan signifikansi pada nilai prob. $0,0358 < a = 0,05$. Artinya secara parsial rata-rata lama sekolah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh. Dalam analisis, variabel pendidikan menunjukkan nilai koefisien negatif terhadap kemiskinan, yang berarti bahwa peningkatan tingkat pendidikan berhubungan dengan penurunan tingkat kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan dalam

pendidikan berkontribusi pada pengurangan kemiskinan. Penelitian ini sesuai dengan penelitian (Natasya et al., 2022), (Susanto & Pangesti, 2019a), (Wahyu Azizah et al., 2018) dan (Ulia & Asnidar, 2022) yang menyatakan bahwa rata-rata lama sekolah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.

Pengaruh Upah Minimum Terhadap Kemiskinan

Berdasarkan tabel 4 hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai koefisien variabel upah minimum sebesar 1,120126 dan signifikansi pada nilai prob. $0,4161 > \alpha = 0,05$. Artinya secara parsial upah minimum berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh. Dalam analisis, variabel upah minimum menunjukkan nilai koefisien positif terhadap kemiskinan, yang berarti menunjukkan bahwa perubahan dalam upah minimum tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh. Penelitian ini sesuai dengan penelitian (Putri & Putri, 2021), (Sutikno et al., 2019), (Rivana & Gani, 2024). yang menyatakan bahwa upah minimum berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan.

Pengaruh Pendidikan dan Upah Minimum Terhadap Kemiskinan

Berdasarkan tabel 4 hasil penelitian ini menunjukkan nilai prob sebesar $0,000002 < \alpha = 0,05$. Artinya secara simultan pendidikan dan upah minimum memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh. Pendidikan memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, individu yang berpendidikan cenderung memiliki keterampilan dan pengetahuan yang lebih baik, dengan meningkatnya tingkat pendidikan, diharapkan tingkat kemiskinan dapat menurun, karena individu memiliki peluang yang lebih baik untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Di sisi lain, upah minimum yang lebih tinggi juga dapat mendorong perusahaan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi, yang pada gilirannya dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja, hal ini dapat membantu mereka memenuhi kebutuhan dasar dan mengurangi tingkat kemiskinan. Hal ini sesuai dengan penelitian (Utami, 2018), (Mengko et al., 2023). yang menyatakan pendidikan dan upah minimum berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

5. KESIMPULAN

Secara parsial, pendidikan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh, sedangkan upah minimum secara parsial berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh. Secara simultan variabel pendidikan dan upah minimum secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh.

Dalam penelitian ini, nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,9288, artinya variabel pendidikan dan upah minimum mempengaruhi kemiskinan Provinsi Aceh sebesar 92,88 %. Sedangkan sisanya sebesar 7,12%, dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini yang juga memengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh.

DAFTAR REFERENSI

- Amalia, R., Khafiah, L., Rajani, T., & Kurniawan, M. (2024). Pengaruh Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka, Dan Pendidikan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Jawa Timur Tahun 2014-2023. *Journal Economic Excellence Ibnu Sina*, 2(2), 80–91.
- Badan Pusat Statistik, (2024). Jumlah Penduduk Miskin dalam Tahun 2011-2023, Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh.
- Badan Pusat Statistik, (2024). Rata-rata Lama Sekolah dalam Tahun 2011-2023, Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh.
- Badan Pusat Statistik, (2024). Upah Minimum Regional dalam Tahun 2011-2023, Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh.
- Haughton & Shahidur. (2009). Handbook on Poverty and Inequality. In *Handbook on Poverty and Inequality* (Issue January 2009). <https://doi.org/10.1596/978-0-8213-7613-3>
- I D. G. M. Radityana, I K. Djayastra, A. A. N. Bagus Danendra, & Wisnu, N. (2023). Pengaruh Upah Minimum, Indeks Pembangunan Manusia dan Pengangguran Terbuka terhadap Jumlah Kemiskinan di Provinsi Bali. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Manajemen Indonesia (JKEMI)*, 1(1), 16–24. <https://doi.org/10.61079/jkemi.v1i1.3>
- Mengko, G. F. C., Kalangi, J. B., & Maramis, M. T. . (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum dan Pendidikan Terhadap Kemiskinan di Kota Tomohon. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 23(2), 13–24.
- Natasya, P., Nurlina, Puti Andiny, Zainuddin, & Jalaluddin. (2022). Pengaruh Pendidikan Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Kemiskinan Provinsi Aceh. *Jurnal Sociohumaniora Kodepena (JSK)*, 3(2), 188–198. <https://doi.org/10.54423/jsk.v3i2.109>
- Netri, N. N., Kawung, G. M. ., & Siwu, H. F. D. (2023). Pengaruh Tingkat Pengangguran, Upah dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Bolaang

- Mongondow Tahun 2009-2021. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 23(6), 97–108.
- Okta Ryan, J. E., Ekonomi, F., & Semarang, U. N. (2013). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum, tingkat pengangguran terbuka, dan inflasi terhadap kemiskinan di indonesia tahun 2009-2011. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Inflasi Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2009-2011*, 91.
- Pomarol, A., & Riva, F. (2014). Towards the ultimate SM fit to close in on Higgs physics. *Journal of High Energy Physics*, 2014(1). [https://doi.org/10.1007/JHEP01\(2014\)151](https://doi.org/10.1007/JHEP01(2014)151)
- Putri, E. M., & Putri, D. Z. (2021). Pengaruh Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka, Pendidikan Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Ecosains: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembangunan*, 10(2), 106. <https://doi.org/10.24036/ecosains.11564057.00>
- Rivana, M., & Gani, I. (2024). Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka dan Indeks Pembangunan Manusia serta Upah Minimum terhadap Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 20(1), 1–20.
- Romi, S., & Umiyati, E. (2018). Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan upah minimum terhadap kemiskinan di Kota Jambi. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 7(1), 1–7. <https://doi.org/10.22437/pdpd.v7i1.4439>
- Silvia, & Wildan. (2024). Pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota (Umk) Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (Tpt) Dan Kemiskinan. *Journal of Development Economic and Social Studies*, 3(1), 72–83. <https://doi.org/10.21776/jdess.2024.03.1.6>
- Sirait, J. F., Ferayanti, F., & Qudraty, M. F. (2022). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Perlindungan Sosial dan Kesehatan terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan*, 7(4), 235–244.
- Siti Hanifah, N. H. (2021). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Lamongan*. 1, 191–206.
- Susanto, & Pangesti. (2019a). Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Kemiskinan di DKI Jakarta. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 5(4), 340. <https://doi.org/10.30998/jabe.v5i4.4183>
- Susanto, R., & Pangesti, I. (2019b). Pengaruh tingkat pendidikan terhadap kemiskinan. *Journal of Applied Business and Economic*, 5(4), 340–350.
- Sutikno, R. Y., Rotinsulu, D. C., & Tumangkeng, S. Y. L. (2019). Pengaruh Upah Minimum Dan Investasi Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 19(01), 88–98.
- Sutrisno, S. (2016). Capital structure: Determining factors and their influence on company value. *Jurnal Siasat Bisnis*, 20(1), 79–89.
- Ulia, R., & Asnidar. (2022). Analisis Pertumbuhan Penduduk Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Aceh Tamiang. *Akuntansi*, 1(4), 202–211. <https://doi.org/10.55606/jurnalrisetilmuakuntansi.v1i4.123>

- Utami, H. W. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Pendidikan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2013. *EKOSIANA: Jurnal Ekonomi Syari'ah*, 4(01), 11–20. <https://doi.org/10.30957/ekosiana.v4i01.41>
- Wahyu Azizah, E., Kusuma, H., Kunci, K., Perkapita, P., & Penduduk, J. (2018). Pengaruh Pendidikan, Pendapatan Perkapita Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2, 167–180.